**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**
**SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)**
**PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026**
**PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI**

Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 diadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Rapat dibuka oleh Bapak Roberto Sianturi, S.H. sebagai Ketua Tim Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menyampaikan bahwa tujuan diadakannya monitoring dan evaluasi SPAK secara rutin adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

Kemudian acara rapat dilanjutkan oleh Bapak Alius Lase, S.H selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Bapak Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menyampaikan, berdasarkan laporan hasil survei persepsi anti korupsi pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang pelaksanaan surveynya dilakukan dalam periode triwulan II yaitu pada bulan April-Juni 2026, didapatkan hasil sebagai berikut:

| No | Unsur Pertanyaan | Nilai Rata-rata | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Manipulasi Peraturan/Prosedur | 4,000 | Sangat Baik |
| 2 | Penyalagunaan Jabatan | 4,000 | Sangat Baik |
| 3 | Menjual Pengaruh | 4,000 | Sangat Baik |
| 4 | Transparansi Biaya | 4,000 | Sangat Baik |
| 5 | Biaya Tambahan | 4,000 | Sangat Baik |
| 6 | Hadiah | 4,000 | Sangat Baik |
| 7 | Transparansi Pembayaran | 4,000 | Sangat Baik |
| 8 | Percaloan | 4,000 | Sangat Baik |
| 9 | Perbuatan Curang | 4,000 | Sangat Baik |
| 10 | Transaksi Rahasia | 4,000 | Sangat Baik |

Dari 3 (tiga) nilai SPAK terendah tersebut diatas adapun tindak lanjut yang dilakukan tim dalam hal ini yaitu:

1. Indikator Terendah I: Transparansi Pembayaran
    - Penyebab/Kendala: Masih ada pengguna layanan atau Masyarakat yang masih belum memahami regulasi terkait pembayaran tentang tarif/biaya perkara atau PNBP produl layanan lainnya.
    - Solusi: Mengarahkan masyarakat untuk mengakses website untuk melihat informasi tentang pembayaran dan transaksi lainnya
    - Rencana Tindak Lanjut: Tersedianya tanda terima pembayaran/kwitansi yang memuat rincian pembayaran pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli
    - Pelaksanaan: Dilaksanakan tanggal 21 Juli 2026

2. Indikator Terendah II: Pencaloan
    - Penyebab/Kendala: Masih adanya Masyarakat yang mempercayakan calo untuk mengurus urusannya di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sehingga biaya tarif yang dibayarkan lebih mahal.
    - Solusi: Petugas PTSP tidak memberikan celah kepada Calo
    - Rencana Tindak Lanjut: Memberikan arahan kepada petugas PTSP untuk tidak memberikan celah kepada calo dan meningkatkan integritas kerja
    - Pelaksanaan: Dilaksanakan tanggal 21 Juli 2026

3. Indikator Terendah III: Perbuatan Curang
    - Penyebab/Kendala: Masih adanya pengguna layanan (pihak berperkara/masyarakat) yang belum memahami sepenuhnya alur, waktu, dan biaya resmi (PNBP) suatu layanan, sehingga memicu keinginan untuk mencari jalan pintas atau menggunakan jasa perantara (calo).
    - Solusi: Menyediakan sistem informasi layanan yang mudah diakses (website, media sosial, banner di PTSP) yang memuat estimasi waktu proses, biaya *by system* (misalnya e-Court, aplikasi Surat Keterangan Elektronik/eraterang), dan alur pengaduan.
    - Rencana Tindak Lanjut: Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelayanan berbasis digital (e-Court, eraterang) guna meminimalisir tatap muka langsung antara pengguna layanan dan petugas.
    - Pelaksanaan; Dilaksanakan tanggal 21 Juli 2026

Kemudian Bapak Roberto Sianturi, S.H sebagai Ketua Tim Survei menyampaikan perlunya kerjasama seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang dilakukan maka nilai Survey Persepsi Anti Korupsi pada periode Triwulan II akan meningkat dan tercapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan dihimbau kepada para petugas survey untuk melakukan pendampingan kepada responden yang kesulitan dalam menjawab pertanyaan atau kuisioner yang diberikan. Kemudian acara monitoring dan evaluasi ditutup.

Gunungsitoli, 21 Juli 2026

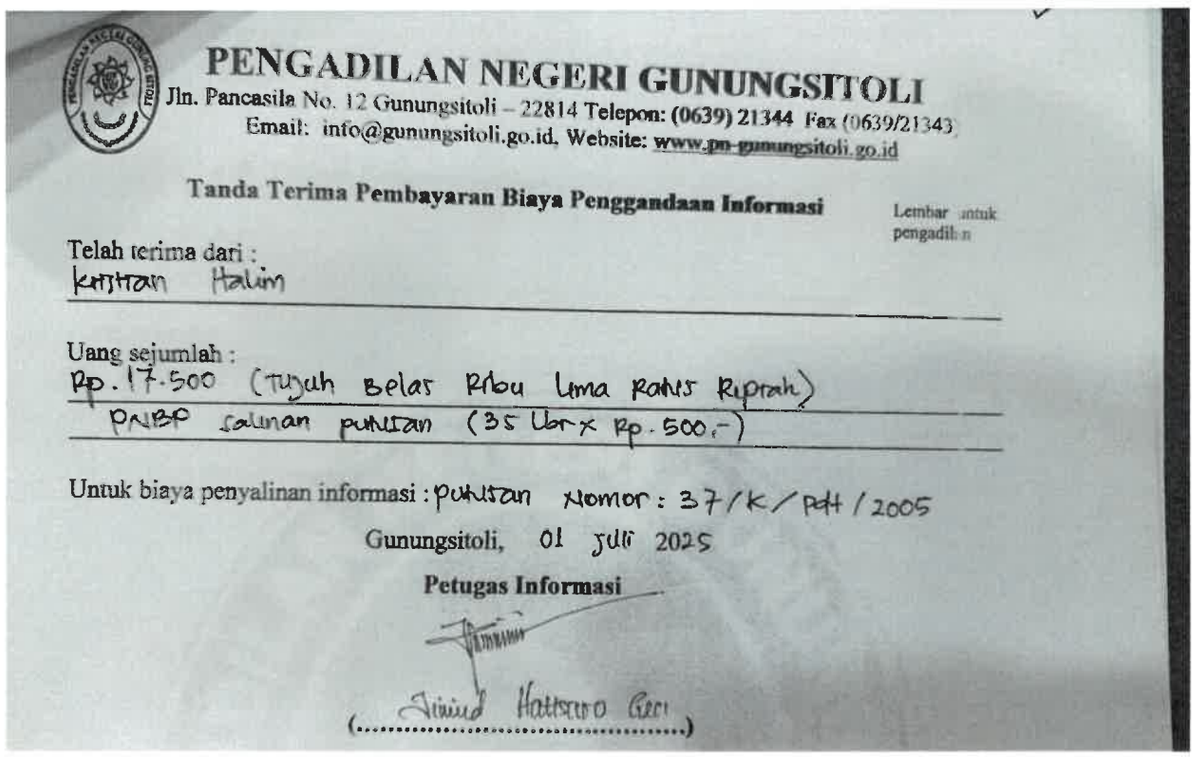
Ketua Tim SKM dan SPAK

Roberto Sianturi, S.H
NIP. 19940606 201712 1 002

# LAMPIRAN

## EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH I
## TRANSPARANSI PEMBAYARAN

Tersedianya kwitansi yang memuat rincian pembayaran



**PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**
Jln. Pancasila No. 12 Gunungsitoli – 22814 Telepon: (0639) 21344 Fax (0639/21343)
Email: info@gunungsitoli.go.id, Website: www.pn-gunungsitoli.go.id

**Tanda Terima Pembayaran Biaya Penggandaan Informasi**

Lembar untuk pengadilan

Telah terima dari :
kristian Halim

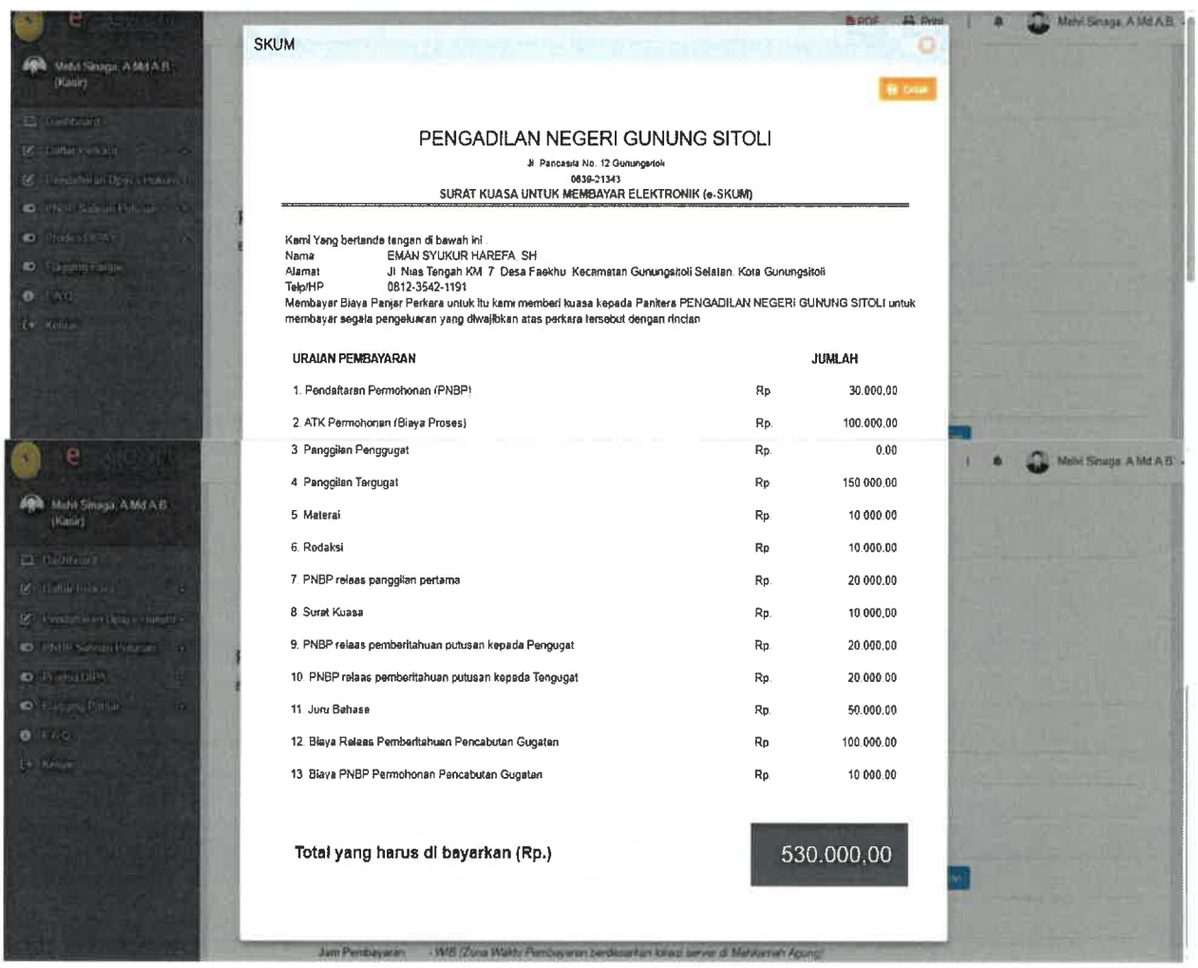
Uang sejumlah :
Rp. 17.500 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Riprah)
PNBP salinan putusan (35 Lbr x Rp. 500,-)

Untuk biaya penyalinan informasi : putusan Nomor : 37/K/Pdt/2005

Gunungsitoli, 01 juli 2025

**Petugas Informasi**

(Jimmi Hattsraro Gea)



SKUM

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

Jl Pancasila No. 12 Gunungsitoli
0639-21343

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ELEKTRONIK (e-SKUM)

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : EMAN SYUKUR HAREFA, SH
Alamat : Jl. Nias Tengah KM 7 Desa Faekhu Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli
Telp/HP : 0812-3542-1191
Membayar Biaya Panjar Perkara untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI untuk membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut dengan rincian

| URAIAN PEMBAYARAN | | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. Pendaftaran Permohonan (PNBP) | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Permohonan (Biaya Proses) | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp. | 0,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp | 150.000,00 |
| 5. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 7. PNBP relaas panggilan pertama | Rp. | 20.000,00 |
| 8. Surat Kuasa | Rp. | 10.000,00 |
| 9. PNBP relaas pemberitahuan putusan kepada Penggugat | Rp. | 20.000,00 |
| 10. PNBP relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat | Rp. | 20.000,00 |
| 11. Juru Bahasa | Rp. | 50.000,00 |
| 12. Biaya Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan | Rp | 100.000,00 |
| 13. Biaya PNBP Permohonan Pencabutan Gugatan | Rp. | 10.000,00 |
| **Total yang harus di bayarkan (Rp.)** | | 530.000,00 |

Jam Pembayaran : WIB (Zona Waktu Pembayaran berdasarkan lokasi server di Mahkamah Agung)

**EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH II**
**PERCALOAN**

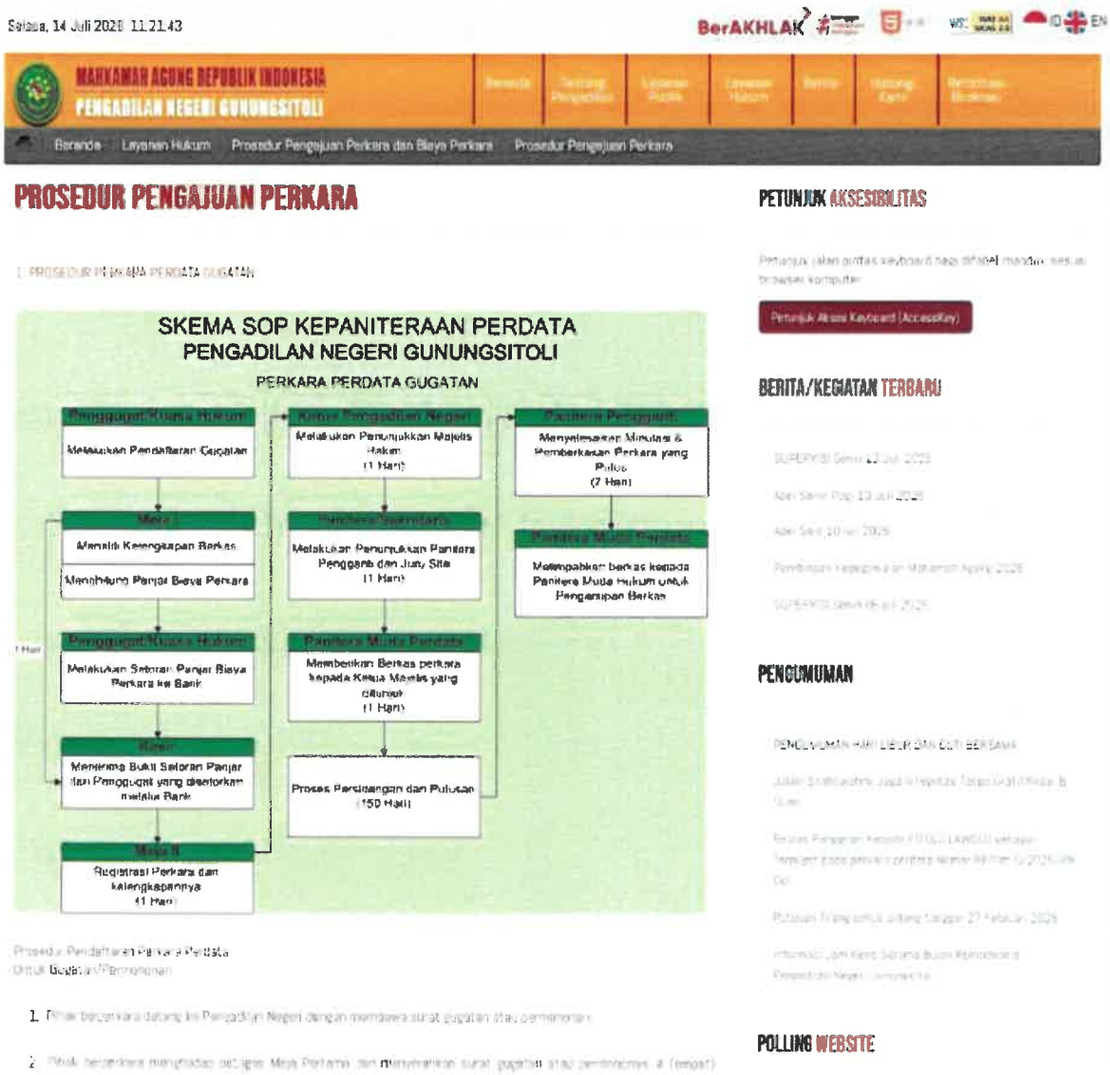
Memberikan pengarahan kepada petugas PTSP untuk tidak memberikan celah kepada calo dan meningkatakan integritas kerja





**LAMPIRAN**
**EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH III**
**PERBUATAN CURANG**

Menyediakan sistem informasi layanan yang mudah diakses di Website




Di Media Sosial






Tersedianya Brosus pengurusan Surat Keterangan tidak pernah dipidana/ tidak sedang dicabut hak pilihnya



**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI**
**SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)**
**PERIODE TRIWULAN II**
**PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI**

## A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi
7. asional Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibuatnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey persepsi anti korupsi (SPAK) adalah untuk pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK/WBBM).
2. Tujuan dibuatnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey persepsi anti korupsi (SPAK) adalah untuk memberikan saran dan masukan kepada pimpinan guna mengambil keputusan lebih lanjut.

## C. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Adapun hasil tindak lanjut 3 Unsur terendah monitoring dan evaluasi survey persepsi anti korupsi (SPAK) antara lain:

1. Indikator Terendah I : Transparansi Pembayaran

   Tindak lanjut dari unsur ini adalah : Tersedianya tanda terima pembayaran/kwitansi yang memuat rincian pembayaran pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli

2. Indikator Terendah II: Pencaloan

   Tindak lanjut dari unsur ini adalah : Memberikan arahan kepada petugas PTSP untuk tidak memberikan celah kepada calo dan meningkatkan integritas kerja

3. Indikator Terendah III: Menjual Pengaruh

   Tindak lanjut dari unsur ini adalah Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelayanan berbasis digital (e-Court, eraterang) guna meminimalisir tatap muka langsung antara pengguna layanan dan petugas.

## D. Penutup

Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei persepsi anti korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Gunung Sitoli ini dibuat sebagai saran dan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan kebijakan labih lanjut.

Gunungsitoli, 21 Juli 2026

Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli



Zulfadly, S.H., M.H.

NIP. 19760906 200112 1 002

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**
**PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI**
**Jln. Pancasila No. 12 Gunungsitoli – 22814 Telepon : (0639) 21344 – Fax (0639/21343)**
**Email : info@gunungsitoli.go.id , Website : www.pn-gunungsitoli.go.id**

Nomor : W2.U12/ /HK/VII/2026 Gunungsitoli, 20 Juli 2026
Perihal : *Undangan rapat*

Kepada Yth.
Plt. Panmud Hukum dan Staff Kepaniteraan Muda Hukum
Di
Tempat

Dengan Hormat

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi SKM dan SPAK di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB yang akan dilaksanakan pada :

Pada hari, tanggal : Selasa, 21 Juli 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Acara : Monitoring dan Evaluasi SKM dan SPAK

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim SKM dan SPAK

Roberto Sianturi, S.H
NIP. 19940606 201712 1 002

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**
**PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI**
Jln. Pancasila No. 12 Gunungsitoli – 22814 Telepon : (0639) 21344 – Fax (0639/21343)
Email : info@gunungsitoli.go.id , Website : www.pn-gunungsitoli.go.id

## Daftar Hadir
## Monitoring Dan Evaluasi SKM dan SPAK
## Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas I B
## Hari Selasa, 21 Juli 2026

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roberto Sianturi, S.H | Ketua Tim | 1. | |
| 2. | Alius Lase,S.H. | Sekretaris Tim | 2. | |
| 3. | Hagaina Monika Br Tarigan, S.H | Anggota | 3. | |
| 4. | Jimid Hatisaro Gea, A.Md | Anggota | 4. | |
| 5. | Wirni Sandroto, S.E | Anggota | 5. | |

Ketua Tim SKM dan SPAK

Roberto Sianturi, S.H
NIP. 19940606 201712 1 002

# DOKUMENTASI



